#### **BAB II**

#### KERANGKA TEORI

Sehubungan dengan tema penelitian yaitu tentang "Strategi Gerakan Civil Society Dalam Mengawal Politik Hijau Di Kota Surabaya (Gerakan LSM Nol Sampah dalam melakukan perlindungan di Pantai Timur Surabaya)", dalam bab ini peneliti ingin menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan kajian teori yang berhubungan dengan kasus penelitian. Konsep tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa data yang ditemukan.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendekatan teoritis yang nantinya akan menunjang proses analisis data. Beberapa teoritik tersebut adalah teori atau konsep *Civil Society*, teori Gerakan sosial baru dan teori Politik Hijau. Teori Gerakan Sosial Baru dan *Civil Society* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan fokus penelitian berlandaskan pada organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan Politik Hijau digunakan sebagai pisau analisa dalam menganalisis berdirinya bangunan permanen dikawasan pantai timur surabaya.

Peneliti juga menggunakan beberapa dasar hukum sebagai landasan, seperti Peraturan daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2007, tentang penetapan Kawasan Konservasi Pantai Timur Surabaya seluas 2.500 hektare. Kemudian peraturan Pemerintahan Kota Surabaya Mengatur Perda Kota Surabaya No. 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034. Sesuai penjelasan diatas maka akan dijelaskan lebih rinci dalam bab-bab di bawah ini.

#### A. Teori Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial dipandang sebagai suatu gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Gerakan sosial lahir sebagai wujud reaksi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan rakyat dan adanya keinginan untuk menciptakan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain). Dalam konteks ini tuntutan perubahan seringkali muncul karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

# a. Pemetaan Teori Gerakan Sosial

Beragam pendapat yang dilahirkan oleh para ahli tentang gerakan sosial pada dasarnya dapat dipilah dalam klasifikasi tradisi teoritik dari studi tentang gerakan sosial, yang meliputi <sup>1</sup>:

#### 1. Klasik

Meliputi studi perilaku kolektif dari kerumunan (crowd), kerusuhan (riot), dan pemberontakan yang banyak dilakukanoleh teoritisi barat yang berorientasi pada ajaran psikologi sosial klasik dan sejarawan sebelum era tahun 1950-an. Beberapa contoh karya aliran ini diantaranya G.Tarde's Laws of Imitation (1903), Gustave Le Bon's The Crowd (1909), William McDougall's The Grouup Mind (1920) dan E.D. Martin's tentang The Behaviour of Croud (1929) yang didasarkan pada studi tentang perilaku kolektif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sukmana, Oman. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. Hal: 8-9.

#### 2. Neo Klasik

Aliran ini dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi gerakan sosial lama, yang kebanyakan dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Tradisi ini dibagi lagi dalam dua model studi gerakan sosial lama yang berbeda, yaitu fungsionalis dan model dialektika Marxis.

## 3. Kontemporer atau Gerakan Sosial Baru (New Social Movements)

Tidak sebagaimana gerakan sosial lama (klasik dan neo klasik). Orientasi gerakan ini tidak meliputi diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, revolusi kelas, danperjuangan kelas. Pada dasarnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tidak tertarik untuk mempertanyakan ide revolusi. Paradigma ideologi dan orientasi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) lebih menonjolkan pluralitas, yang ditunjukkan secara beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminism, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individudan perdamaian

Gerakan sosial baru (New Sosial Movement) pendekatan teoritisnya meliputi antara lain: Pertama, Teori Mobilisasi Sumber Daya (The Resource Mobilization Theory) dan Kedua adalah Teori Identitas (The Identity Oriented Theory). Menurut Aberle, Cameron, dan Blumer menggelompokkan tipe gerakan sosial didasarkan dalam beberapa aspek, yakni berdasarkan aspek tujuan gerakan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Blumer mengelompokkan gerakan sosial menjadi dua tipe yakni: (1) gerakan sosial umum dan (2) gerakan sosial khusus. Seangkan berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besrannya maka gerakan sosial dikelompokkan menjadi empat tipe yakni

(1) Gerakan Sosial Alternatif (Alternative Social Movements) (2) Gerakan Sosial Pembebasan (Redemptive Social Movements) (3) Gerakan Sosial Revormasi (Reformative Social Movements) (4) Gerakan Sosial Revolusi (Revolutionary Social Movements). Penggelompokan tipe berdasarkan kedua dimensi tersebut dapat digambarkan melaui tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Tipe Tipe Gerakan Sosial

Sasaran		
Perubahan	Terbatas	Menyeluruh
Khusus Individu	Gerakan Sosial Alternatif	Gerakan Sosial Pembebasan
	(Alterna <mark>tiv</mark> e Soci <mark>al</mark>	(Redemptive Social
	Movements)	Movements)
Semua Orang	Gerakan Sosial Revormasi	Gerakan Sosial Revolusi
	(Reformative Social	(Revolutionary Social
	Movements)	Movements)

### Sumber: Oman Sukmana hal 16.

Tipe pertama yaitu Alternative Movements, suatu gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap status quo sangat kecil karna sasarannya dari gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang terbatas hanya kepada sebagian dari populasi. Tipe kedua adalah Redemptive Movements, gerakan sosial yang memiliki fokus selektif, tetapi ditunjukkan terhadap perubahan yang radikal (lebih mengakar) pada individu. *Reformative Movements*, gerakan sosial yang ditunjukan untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang, umumnya

gerakan sosial ini terjadi dalam sistem politik. Tipe gerakan ini biasanya bersifat progresif. Kemudian yang terakhir Gerakan Sosial Revolusi (*Revolutionary Social Movements*) merupakan tipe gerakan sosial yang paling keras dibandingkan tipe gerakan sosial yang lainnya.<sup>2</sup>

Secara kontekstual, Gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologi mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya telah mengalami penciutan dan digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Dan secara radikal gerakan sosial baru mengubah paradigma marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelasdan konflik kelas. Sehingga gerakan sosial baru didefinisikan sebagai tampilan gerakan yang non kelas serta pusat perhatian yang non materialistik, dan karena gerakan social baru tidak ditentukan oleh latar belakang kelas, maka mengabaikan organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian, tetapi lebih melibatkan politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput. Struktur gerakan sosial baru didefenisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi heterogenitas basis sosial mereka.

Menurut Pichardo dan Singh, teori gerakan sosial baru bercirikan sebagai berikut<sup>3</sup>:

 Ideologi dan tujuan gerakan sosial baru meninggalkan orientasi ideologis yang melekat pada gerakan sosial lama. Gerakan sosial baru menepis semua asumsi Marxian semua perjuangan dan pengelompokan di dasari pada konsep kelas. Gerakan sosial yang bertujuan untuk menumbangkan

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sukmana, Oman. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. Hal 16-17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.

posisi Negara kemudian menggantikannya dengan kekuatan proletar. Namun dalam gerakan sosial baru, mereka memposisikannya sebagai partner pemerintah atau Negara untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.

- 2. Taktik dan pengorganisasian, Gerakan sosial baru umumnya tidak lagi mengikuti pengorganisasian seperti serikat buruh, atau model politik kepartaian lebih memilih saluran di luar politik normal dan menerapkan taktik yang mengganggu dari mobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik serta cenderung menggunakan demonstrasi yang amat dramatis.
- 3. Partisipan atau aktor, menurut Pichardo partisipan gerakan sosial baru muncul dari kalangan kelas menengah baru yang bekeija di sektor ekonomi non produktif umumnya adalah kaum terdidik.
- 4. Medan atau area, merupakan lintasan batas regional,dari arah lokal sampai internasional. Strategi dan cara mobilisasi bersifat global.

Gerakan sosial baru tidak melibatkan diri dalam politik, atau menghindar menjadi dilembagakan sendiri. Beberapa gerakan sosial baru terintegrasi ke dalam sistem partai dan memperoleh akses reguler terhadap regulasi, implementasi, dan pengambilan keputusan. Seperti di beberapa partai-partai hijau yang menonjol di Eropa dengan beberapa memiliki manifest lokal dibeberapa tempat. Dengan demikian paradigma gerakan sosial baru, mengakui tidak ada gaya taktik yang khas dari gerakan sosial baru lebih sekedar opini publik dan politik anti institusi.

#### b. Ciri-ciri Gerakan Sosial Baru

Penting kiranya kita untuk membedakan antara ciri Gerakan Sosial Lama dengan Gerakan Sosial Baru. Hal ini diperlukan agar kita tidak terjebak dalam gaya fikiran Gerakan Sosial Lama. Selain itu, karakteristik atau ciri dari gerakan sosial lama sering kali tersamarkan dalam kajian Gerakan Sosial Lama. Gerakan-gerakan terkait dengan isu-isu lingkungan, feminisme, hak asasi manusia, perdamaian dan sebagainya yang secara eksplisit biasanya dikategorikan sebagai bagian dari kajian Gerakan Sosial Baru. Kajian yang menggunakan tematema tersebut dapat menggunakan teori gerakan sosial sebagai pisau analisisnya. Terdapat berbagai tokoh yang mencoba mendapatkan karakteristik atau ciri dalam membedakan kajian antara Gerakan Sosial Lama dengan Gerakan Sosial Baru.

Dalam hal ini, acu<mark>an yang diguna</mark>kan <mark>me</mark>nggunakan pendapat Singh.

Adapun ciri Gerakan Sosial Baru yaitu <sup>4</sup>:

1) Pertama, Gerakan Sosial Baru membangkitkan isu 'pertahanan diri' komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatus negara: agen agen pengawasan dan kontrol sosial. Perlu disadari bahwa gerakan sosial baru bukanlah demi anarki, ia menyerukan sebuah kondisi sosial yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan bersinergi dengan alam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sukmana, Oman. (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing

Kedua, secara radikal Gerakan Sosial Baru mengubah paradigma
 Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas

dan konflik kelas.

- 3) Ketiga, mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang aksi kolektif, Gerakan Sosial Baru pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian.
- 4) Keempat, struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan sebagai pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial mereka. Setelah kita dapat mengetahui ciri dari Gerakan Sosial Baru.

Dalam hal ini gerakan sosial baru tampil trans-manusia mereka mendukung pelastarian alam dimana manusia menjadi bagian. Perjuangan menentang perang nuklir, perlombaan senjata dan demi ekologis lingkungan, perdamaian masyarakat sipil, identitas individual, kebebasan dan kedaulatan personal, merupaka perjuangan yang menghamparkan kebersamaan warga dari beragam nasionalitas, kebudayaan dan sistem politik. Gerakan sosial baru adalah kekuatan sosial yang besar dan basis sosial yang luas. Para aktor gerakan sosial beroperasi bukan karena kepentingan kelas, akan tetapi mereka berjuang demi kepentingan sosial.<sup>5</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. Hal: 131.

## c. Teori Identitas (The Identitiy-Oriented Theory).

Menurut Singh, teori berorientasi Identitas (*The Identity Oriented Theory*) tentang gerakan sosial kontemporer (*contemporary social meovements*) menjelaskan asumsi dasar sebagai kritik terhadap perspektif teori Mobilisasi Sumberdaya (*The Resource Mobilisation Theory*). Basis rasionalitas dari teori mobilisasi sumberdaya dianggap tidak cukup memadai dalam menjelaskan gerakan sosial baru. Teori mobilisasi sumberdaya dianggap gagal dalam menjelaskan beberapa ekspresi dari Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*), seperti: gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan damai, gerakan perlucutan senjata, dan gerakan kebebasan lokal.

Teori Identitas (*The Identity-Oriented Theory*) sangat dominan di Eropa, sebagai oposisi atas penjelasan (eksplanasi) rasionalitas tentang gerakan sosial kontemporer yang umumnya dirumuskan dan dipraktekan oleh sarjana-sarjana di Amerika, khususnya eksplanasi yang digambarkan oleh Teori Mobilisasi Sumberdaya (*The Resource Mobilisation Theory*). Dibandingkan dengan teori Mobilisasi Sumberdaya yang memfokuskan dan terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme (*rationalism and materialism*), maka teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*). Secara umum mempunyai sifat-sifat nonmaterialistik dan ekspresif (*non materialistic and expressive in nature*). Teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*) membahas pertanyaan pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif. <sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Singh, Rajendra. (2010). Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book. Hal 113.

Paradigma teori Identitas (the Identity-Oriented Theory), meskipun meletakkan pembahasan ke dalam pertanyaan-pertanyaan tentang solidaritas dan integrasi. Menurut pandangan teori ini, baik konsep Durkhemian tentang anomi dan gangguan (anomie and breakdown) atau pandangan Smelserian tentang ketegangan (strain), arus pendek/"korsleting" (short-cicuiting), keyakinan umum (generalized beliefs), dan sebagainya, dianggap kurang relevan untuk menjelaskan tentang perilaku kolektif (collective behavior). Penyimpangan social (social aberration), sebagai gagasan tentang anomi atau gangguan social (anomie or social breakdown), tidak bisa dijadikan jendela dalam memandang berbagai dimensi tentang gerakan social.

Para pendukung teori Identitas, meskipun sementara mereka menerima beberapa elemen repertoar dari teori Marxist seperti gagasan tentang perjuangan (struggle), mobilisasi (mobilization), kesadaran (consciousness), dan solidaritas (solidarity), namun mereka menolak tesis reduksionisme dan deterministik materialisme dan konsep-konsep basis materialistik tentang formasi sosial (social formation). Determinisme Marxist, dan konsekuensi yang menyangkut reduksionisme, ditinggalkan karena terkesan berlebih-lebihan. Formasi-formasi sosial baru (new social formations) dan Gerakan Sosial Baru (New Social Movements) seperti ekologi (ecology), feminism (feminism), perdamaian (peace) dan mobilisasi akar rumput (grassroots mobilisation) melampaui ide tentang kelas dan melewati batas kondisi material. <sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sukmana, Oman. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing hal 143.

Dengan demikian, teori Identitas merupakan teori yang berorientasi post-Marxism. Post-Marxism sebagai cara (mode) berpikir kritis adalah merupakan logika tentang bentuk-bentuk sosial (social forms) dari post-materialism, post-industrialismdan post-capitalism. Bentuk-bentuk sosial ini, merupakan sifat yang muncul dari refleksi kritis kontemporer dan aplikasi empirisme ekspresif sebagai metode dalam memahami konsepsi tentang post-society, post-sociology dan New Social Movements merupakan kesepakatan umum (general agreement) bahwa gerakan berorientasi identitas (identity oriented movements) dan tindakan kolektif (collective actions) adalah merupakan ekspresi tentang upaya penyelidikan tentang identitas (identity), otonomi (autonomy), dan pengakuan (recognition) manusia.8

Menurut Benford and Snow, Soule, dalam literatur ilmu sosial tentang gerakan, konsep identitas kolektif (collective identity) digunakan secara luas. Identitas kolektif dipandang baik sebagai pendahulu (prasyarat) yang diperlukan bagi munculnya tindakan kolektif maupun sebagai hasil dari gerakan tindakan kolektif. berbagai teori dan pada semua level analisis. Identitas kolektif telah menjadi pusat kajian analisis tentang kemunculan (emergence) gerakan, lintasan (trajectories) gerakan, dan dampak (impacts) gerakan. Kajian tentang Identitas juga masuk ke dalam dimensi analisis konstruksi ketidakpuasan dan proses-proses pembingkaian (framing), motivasi keikutsertaan (motivation for participation), pilihan taktik aktivis (activists tactical choices), hasil (life-course outcomes), dan emosi (emotions). Identitas kolektif tampaknya telah menjadi konsep sentral untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book. Hal 114.

hampir setiap perspektif teoritis dan pertanyaan-pertanyaan empiris yang terkait dengan studi-studi kontemporer tentang gerakan sosial.<sup>9</sup>

Teori tentang aksi kolektif secara sistematis menjelaskan konsep identitas kolektif (collective identity), solidaritas (solidarity), dan komitmen (commitment). Ketiga konsep ini membentuk basis sistematis, teori komprehensif yang mensintesakan perspektif-perspektif psikologi, psikologi social dan sosiologi makro. Secara umum, identitas kolektif (collective identity) menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki kepentingan (interest), nilai (values), perasaan (feelings) dan tujuan (goals) bersama. Identitas kolektif di dalamnya meliputi menekankan pada komitmen dari indvidu, menekankan pada solidaritas dari kolektivitas, serta menyoroti secara lebih luas, struktur makrososial dan dinamika yang melampaui gerakan kolektivitas, termasuk yang membantu membentuk dan memberikan interes, konteks politik, simbol kultur, tujuan, dan sebagainya.

Sementara, komitmen (commitment) memfokuskan perhatian kepada investasi individu dalam garis aksi individu yang konsisten dengan garis aksi yang dimunculkan oleh kolektivitas. Sedangkan, solidaritas (solidarity) memberikan perhatian kepada tingkat dari kohesivitas social yang eksis dalam dan bersama kelompok. Solidaritas melakukan eksplorasi tentang hubungan individu dan kolektivitas dengan fokus utama pada kolektivitas. <sup>10</sup>

Johnston dan Klandermans mendefinisikan identitas kolektif (collective identity) sebagai saling interaksi dan berbagi yang diproduksi oleh beberapa

<sup>10</sup> Sukmana, Oman. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing hal 145.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Snow, David A.; Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Hal 432.

individu (atau kelompok pada level yang lebih kompleks) dan memusatkan orientasinya pada tindakan serta peluang dan kendala dimana aksi terjadi. Terdapat tiga unsur dalam identitas kolektif, yakni:

(1) identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan denifisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan. (2) identitas kolektif adalah sebagai proses yang mengacu kepada jaringan relasi aktif antara actor yang berinteraksi (interact), berkomunikasi (communicate), saling mempengaruhi (influence each other), negosiasi (negotiate), dan membuat keputusan (make decisions). Bentuk organisasi dan model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi adalah merupakan bagian dari jaringan relasi, dan (3) Tingkat tertentu dari investasi emosional, yang memungkinkan indivu merasakan seperti seabagi bagian dari suatu kesatuan.<sup>11</sup>

### d. Strategi Gerakan Sosial

Strategi merupakan cara atau metode untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan apa ada tujuan utama dari setiap strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan itu, akan lebih menekankan yaitu pada perubahan institusi-institusi sosial (societal manipulation) ataukah dengan mengubah hati dan pemikiran orang-orang (personal transformation) strategi yang digunakan bersifat terbuka atau tertutup, terang-terangan atau tersembunyi menggunakan strategi penyerangan frontal atau pengikisan 'pendirian' mereka dinyatakan secara halus (polite), melalui aksi

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, hal 147.

protes atau kekerasan mekanisme taktik yang digunakan terhadap kelompok sasaran: persuasi, negosiasi atau paksaan.

Strategi Gerakan Sosial menyebut pentingnya proses framing dalam memahami sukses tidaknya sebuah gerakan sosial. Dalam teoritisi gerakan sosial menggagas suatu konsep skema mengenai *meaning construction* dengan menggunakan term yang disebut *Framing*. Konsep tentang frame atau pembingkaian itu sendiri diperkenalkan oleh Erving Goffman. <sup>12</sup> Menurut Goffman, frame adalah sebuah skema dari intrepretasi, yang memungkinkan individu untuk memetakan, memahami dan mengidentifikasi, serta memberikan label terhadap setiap kejadian-kejadian yang muncul dalam kehidupan mereka dan dunia secara umum.

Cara ini merupakan upaya meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas sehingga mereka terdorong mendesakkan sebuah perubahan. Komponen utama dari proses framing gerakan adalah diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya serta memprediksi elemen sekaligus mengindentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut.

Snow menambahkan bahwa proses framing *collective action frames* adalah skema interpretasi yang merupakan sekumpulan *belifes and meaning*, berorientasi pada aksi yang menginspirasi dan melegitimasi aktivitas sebuah organisasi gerakan sosial. Dalam hal ini, frame dibangun untuk memberikan makna dan menginterpretasi kejadian tertentu, yang dimaksudkan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Benford and Snow, David. 2000, "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, journal Annu. Rev. Sociol. vol 26:611–39, hal 4.

memobilisasi potensi pengikut, serta untuk mendapatkan dukungan pihak lain Sehingga, melalui proses *Framing* tersebut, para aktor gerakan sosial akan saling menilai kemampuan terhadap "tipe sumber daya" dengan "kemampuan mobilisasi aksi" delam beberapa tingkatan.<sup>13</sup>

Setelah melakukan pembingkaian, langkah selanjutnya adalah dengan menyusun strategi yang hendak digunakan dalam menjalankan aksinya. Setidaknya terdapat 4 variasi strategi yang memuat garis besar pengertian dan kaidah umum strategi gerakan sosial sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Low Profile Strategy merupakan strategi isolasi politik yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan otoritarian.
- 2) Strategi Pelapisan (*Layering*). Pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisikan metode dan aktivitas yang berorientasi pemberdayaan dan transformasi sosial.
- 3) Strategi advokasi. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesak perubahan-perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintah yang demokratis, melindungi sumberdaya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan, menciptakan dan memelihara daerah-daerah rawan konflik, dan sebagainya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid hal 5.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Putra, Fadillah, Konsep, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia. Malang: 2006, Averroes Press, hal 10-14.

4) Keterlibatan kritis (*critical engagement*). Organisasi gerakan sosial, terutama *NGO* bisanya menggabungkan beberapa strategi dalam menghadapi lawannya. Hal ini merupakan upaya dalam mengubah kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan gerakan sosial.

## e. Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial

Selama ini praktek politik organisasi gerakan sosial hanya menjadikan kadernya sebagai *community organizer*. Kader dari gerakan sosial hanya melakukan pengorganisasian dalam rangka pemberdayaan komunitas-komunitas yang tak diuntungkan oleh sistem politik. Berbagai pendidikan yang dilakukan meliputi tentang: pertama, pemetaan kondisi eksternal meliputi aspek sosial, hukum, politik, ekonomi dan budaya; kedua, pemetaan kondisi internal organisasi dan personal organisasi yang meliputi penilaian terhadap struktur organisasi, penilaian terhadap ketersediaan perangkat organisasi dan pelaksanaan misi organisasi <sup>15</sup> Meskipun sudah dilakukan strategi pemetaan yang dianggap sudah matang, aksi yang dilakukan gerakan sosial tetap saja mendapatkan hambatan dan tantangan.

Hambatan dapat dipahami sebagai faktor yang menghalangi dalam mencapai tujuannya. Kita dapat membedakan hambatan kedalam dua kategori yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pertama hambatan internal gerakan, merupakan serangkaian masalah dalam tubuh gerakan sosial yang dianggap mengganggu dalam mencapai tujuannya. Hambatan internal dapat

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Arianto, Tri Chandra, 2008 *Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan Reforma Agraria dan Gerakan Sosial di Indonesia Pasca 1998*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 12 (1): 1-20. Hal 31

berupa pola kepemimpinan yang tidak demokratis, tidak ada mekanisme yang jelas dalam struktur organisasi, keterbatasan waktu aktor gerakan untuk totalitas dalam memperjuangkan tujuan gerakan, dan lain sebagainya. Kedua hambatan eksternal gerakan, merupakan permasalahan diluar gerakan dianggap menghalangi cita-cita gerakan seperti regulasi yang tak mendukung, tidak mendapatkan dukungan dari pihak lain, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, sumber daya finansial yang menjadi tantangan utama dari suatu gerakan sosial. Akan tetapi, membedakan tantangan menjadi 3 aspek yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Legitimasi. Legitimasi merujuk pada kompetensi sebuah institusi dalam menciptakan kelembagaan untuk melindungi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya representasi, akuntabilisasi, dan akurasi.
- 2) Keterputusan (*Disconnection*). Keterputusan merupakan bentuk dari pengabaian kerjasama dengan komunitas lokal dan lebih mementingkan membuat program yang berskala luas.
- 3) Pengejaran tujuan jangka pendek (*short-termism*). Kecenderungan, gerakan sosial terlalu menekankan pada perubahan-perubahan yang bersifat jangka pendek dan hanya berurusa keberhasilan kampanye kampanye dan lobi-lobi yang terefleksikan pada perubahan kebijakan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Putra, Fadillah, *Konsep, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*. Malang: 2006, Averroes Press, hal 48-58.

## B. Konsep Masyarakat Sipil (Civil Society)

Istilah Civil Society atau sering juga diterjemahkan dengan masyarakat sipil, Sebagai sebuah konsep, civil society juga dapat dipahami dari latar belakang sejarahnya. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero yang memulai menggunakan istilah societes civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian Civil Society dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi istilah istilah seperti koinonia politike, societas civilis, societe civile, buergerliche gesellschaft, civil society, dan societa civile dipakai secara bergantian dengan polis, civitas, etat, staat, state, dan stato. Maka ketika JJ Rousseau menggunakan istilah societes civile, ia memahaminya sebagai negara yang mana salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial *(social formation)* dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat Pencerahan *(Enlightenment)* dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim rezim *absolut*. Para pemikir politik yang mempelopori pembedaan ini antara lain para filsuf pencerahan Skotlandia yang dimotori oleh Adam Ferguson dan beberapa pemikir

Eropa seperti Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes, dan Tom Paine.<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya, *Civil Society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang segera mengajukan tesis bahwa *Civil Society* tidak bisa dibiarkan tanpa terkontrol. *Civil Society* justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik.

Pandangan Hegel tantang *Civil Society*, yang ia samakan dengan buergerliche Gesellschaft, belakangan mendapat dukungan kuat, termasuk dari Karl Marx. Namun konsepsi Hegelian dan Marxian tentang *Civil Society* yang bercorak sosiologis itu menimbulkan persoalan. karena ia mengabaikan dimensi kemandirian yang menjadi intinya. Ini disebabkan, terutama pada Hegel, posisi negara dianggap sebagai ukuran terakhir dan pemilik ide universal. Hanya pada dataran negaralah politik bisa berlangsung secara murni dan utuh, sehingga posisi dominan negara menjadi bermakna positif. Jika *Civil Society* kehilangan dimensi politiknya dan akan terus tergantung kepada manipulasi dan intervensi negara.

Konsep Hegelian yang memberi posisi unggul terhadap negara ini kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir modern seperti Robert Mohl, JS Mills, Anne de Stael, dan Alexis de Tocqueville. Mereka, terutama yang belakangan ini,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan *Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1999, Hal, 1.

sepakat untuk mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas dalam *Civil society*. Jika pada Marx, *Civil Society* diletakkan pada dataran basis material dari hubungan produksi kapitalis oleh karenanya, disamakan dengan kelas borjuasi, maka Gramsci melihatnya sebagai super struktur dimana proses perebutan posisi hegemonik terjadi. Pemahaman Gramsci memberi tekanan penting pada cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Gramsci, dengan demikian, melihat adanya sifat kemandirian dan politis dari *Civil Society*, kendatipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi). <sup>18</sup>

Menurut de'Tocqueville *Civil Society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *Civil Society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. <sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid, hal 3.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid, Hal, 6.

Konsep mengenai *Civil Society* sendiri dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dimana didalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara hanya merupakan fasilitator. Akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam *Civil Society*, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimaldan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidangbidang lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Einstadt dalam Afan Gaffar Civil Society memiliki empat komponen sebagai syarat; pertama Otonomi, kedua akses masyarakat terhadap lembaga Negara, ketiga arena publik yang bersifat otonom dan keempat arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan komponen komponen tersebut, Civil Society mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak,

\_

Natapraja, Ageng, "Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan" Tesis, Program Study Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, tahun 2009. Hal 15.

serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi yang dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *Civil Society*.<sup>21</sup>

Peran Lsm sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi. Peranan ini umumnya dilakukan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM sebagai tulang punggung dan alternatif munculnya *civil society*. Istilah LSM sendiri lahir dari paradigma *civil society* yang mengejawatahan dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat mulai dari bidang keagamaan, profesi, paguyuban, kaum tani, buruh, pedagang dan unit-unit komunitas lainnya, domain mereka terpisah dari Negara maupun sektor bisnis.<sup>23</sup>

Sebutan LSM sendiri merupakan pengembangan dari istilah *Ornop* (organisasi non pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris *Non Government Organization (NGO)*. LSM sendiri dapat dijabarkan lebih luas lagi, yang paling sederhana Pengertian LSM menurut ensiklopedi online Wikipedia <sup>24</sup> yang dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah disingkat ornop atau

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid Hal 15.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid, Hal, 17

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhammad AS Hikam. Op. cit.,Hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> http://www.id.wikipedia.org, diakses tanggal 29 April 2017 pukul 23.15 wib.

Organisasi Non Pemerintah (*Ornop*) dapat dikatakan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Non Government Organization* atau yang lebih dikenal dengan *NGO*. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut :

- Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara.
- 2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
- 3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Sebagaimana diketahui dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan *Civil Society* yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. *Civil Society* di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara.

Dengan tumbuh dan berkembangnya *Civil Society* yang kuat maka dimungkinkan pencegahan terhadap dampak-dampak negatif dari dua kekuatan tersebut sehingga kehidupan demokratis rakyat tetap terjaga. Dari pihak negara, kemungkinan monopoli atau dominasinya akan mengakibatkan hilangnya

kemandirian pribadi dan merosotnya karsa-karsa bebas di dalamnya yang sebetulnya sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Dampak negatif dari negara yang terlalu intervensionis adalah ketergantungan yang sangat tinggi dari kelompok-kelompok dalam rakyat dan pribadi-pribadi kepadanya.<sup>25</sup>

Namun, dampak negatif dari kekuatan ekonomi pasar pada masyarakat kapitalistik menyebabkan atomisasi dan pasifikasi rakyat yang mengakibatkan memudarnya perekat komunitas. Kapitalisme yang pada intinya menuntut individu dibebaskan sepenuhnya agar dapat mencari kepuasaan, pada gilirannya mendorong terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam rakyat serta memungkinkan melebarnya jurang yang memisahkan antara si kaya dan si miskin. Sistem politik yang mengabaikan kenyataan seperti ini dan tidak mampu melakukan pengawasan atasnya, kendatipun di luar tampak demokratis tetapi di dalam sejatinya mengidap penyakit kronis yaitu alienasi kaum lapis bawah dan kelangkaan partisipasi yang murni dari mereka.<sup>26</sup>

Karena itu, untuk mengurangi dan mengantisipasi ekses-ekses tersebut *Civil Society* menjadi penting. Ia dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas *(the free public sphare)*. Melalui kelompok-kelompok mandiri itulah rakyat dapat memperkuat posisinya vis-à-vis negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad As Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1999.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Mustain mashud, *Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial*, diakses dari http://alhadafisip11.web.unair.ac.id/pada tanggal 13 juli 2017 pukul 20.00 wib.

sesamanya. Sedangkan melalui ruang publik bebas, rakyat sebagai warga negara yang berdaulat (baik individu maupun kelompok) dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap negara. Pers dan forum-forum diskusi bebas yang dilakukan para cendekiawan, mahasiswa, pemimpin agama, dan sebagainya ikut berfungsi sebagai pengontrol kiprah negara.<sup>27</sup>

Dalam pada itu, *Civil Society* yang didalamnya bermuatan nilai-nilai moral tertentu, akan dapat membentengi rakyat dari gempuran sistem ekonomi pasar. Nilai-nilai itu adalah kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian dan seterusnya. Dengan masih kuatnya nilai kepercayaan dan tanggung jawab publik, misalnya, maka akan dapat dikekang sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak eksploitatif yang menjadi motor kapitalisme.

# C. Teori Politik Hijau

Politik lingkungan yang lebih sering disebut politik hijau (Green Politics) mulai melakukan perubahan-perubahan. Gerakan yang pada awalnya hanya berbentuk gerakan aksi, mencoba melembagakan diri ke dalam bentuk partai politik. Asumsinya, gerakan aksi saja tidak cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Sehingga, dibutuhkan institusi seperti partai

<sup>27</sup> Ibid.

\_

politik yang bisa menjadi bagian pengambilan kebijakan di level nasional atau lokal (*stakeholder*).

Permasalahan lingkungan hidup (ekologi) selama dekade 60-an dan 70 an mulai menjadi isu global dalam masyarakat dunia. Suara-suara protes yang awalnya hanya dari kalangan minoritas pecinta lingkungan seperti ilmuwan, aktivis dan kelas menengah, kini telah mampu membawa isu ini manjadi perhatian masyarakat internasional. Hal ini bisa dilihat dari realisasi konferensi Lingkungan Hidup PBB untuk pertama kalinya pada tahun 1972 di Stockholm yang membahas Hukum Internasional Lingkungan. Sejak saat itu, kerjasama Internasional dalam permasalahan lingkungan hidup dimulai oleh negara-negara maju dan berkembang. Bahkan, konferensi ini juga membuka debat internasional mengenai permasalahan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

Sebagai isu global, masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari hampir semua negara di dunia. Sebab,problem dan krisis lingkungan tersebar ke setiap negara, meski dengan ragam dan derajat yang berbeda-beda. Seluruh negara di dunia terlihat dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam G7, meskipun sudah agak terlambat, akhirnya mengagendakan isu ini pada pertemuan mereka pada tahun 1989. Ini menandai bahwa persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada dalain wilayah low politics - isu minor yang menjadi urusan para teknisi tiba-tiba dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia. Isu lingkungan global menjadi soal ketiga

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Apriawan. "Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional". Multyversa, jornal volume 1 no 02, hal, 3.

terpenting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni soal keamanan dan ekonomi. <sup>29</sup>

Puncak dari semua itu adalah diselenggarakannya konferensi tentang Biodiversity di Rio de Janeiro Brasil tahun 1992 dan hasilnya te1ah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Konferensi ini dihadiri oleh 150 negara dan 2500 NGO . KTT Bumi ini juga telah melahirkan kebutuhan akan kode etik dalam memperlakukan lingkungan, sehingga kerusakan bumi tidak menjadi semakin parah. Gagasan ini terefleksi dari pendirian *Bussines Council for Sustainable Development*, yang merupakan wadah para pengusaha di 50 negara anggota untuk mengembangkan sikap moral atau kode etik terhadap lingkungan. Gagasan untuk membiayai berbagai program hijau juga telah melahirkan organisasi PaIang Hijau Internasional (*International Green Cross*), sebagai wadah pengumpulan dana lingkungan <sup>30</sup>

Antroposentrisme adalah pandangan yang terpusat pada manusia yang dalam hal ini manusia merupakan pemegang kendali utama dalam kehidupan sehingga dapat melakukan apapun sesuai kehendaknya. Menurut Eckersley, karakteristik Politik Hijau adalah *ekosentrisme* yang memiliki dasar etis. Ekosentrisme membawa nilai etis, agar manusia tidak lagi berlaku sesuai kehendaknya sendiri, tetapi haruslah mengacu pada lingkungan di sekitarnya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Suharko. 1998. Model-model Gerakan NGO Lingkungan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 2 No 1, hal 2.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid hal, 3

Politik hijau memisahkan Antroposentris dengan Ekosentrisme. Selain itu, pandangan Ekosentrisme melawan kecenderungan ke arah globalisasi dan homogenisasi. <sup>31</sup> Hal ini dikarenakan globalisasi dapat mendorong tumbuhnya berbagai jenis industri yang mampu meningkatkan polusi yang dihasilkan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Ekosentrisme yang bersifat etis memiliki empat ciri utama Eckserley, Pertama, ekosentrisme mengidentifikasi semua masalah kepentingan manusia terhadap dunia bukan-manusia (bertentangan dengan kepentingan ekonomi dalam penggunaan sumber daya). Kedua, mengidentifikasi masyarakat bukan-manusia. Ketiga, mengidentifikasi kepentingan generasi masa depan manusia dan bukan-manusia dan yang terakhir adalah menerapkan suatu perspektif holistik dan bukan atomistic, yaitu dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan alam secara keseluruhan seperti halnya organisme individu.<sup>32</sup>

Di samping itu, Dobson menyebutkan ada tiga argumentasi penting. Pertama adalah solusi teknologi tidak dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Solusi teknologi tidak mampu menyelesaikan krisis yang ada namun hanya mampu menunda krisis tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan kaum modernis yang menganggap bahwa solusi bagi permasalahan lingkungan adalah pengetahuan dan teknologi. Argumentasi kedua yaitu peningkatan pertumbuhan berarti penumpukan bahaya yang mampu berakhir pada bencana. Semakin cepat pertumbuhan, maka semakin sempit ruang yang ada dan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Burchill, S & Andrew Linklater. Teori-Teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa media 1996, hal 339.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid, hal, 337-339.

kemampuan untuk menampung pertumbuhan yang semakin meningkatpun semakin berkurang. Argumentasi ketiga adalah permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan pada dasarnya memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>33</sup>

Sesuai dengan asumsi-asumsi dasar yang telah disebutkan di atas, menurut Burchill dan Linklater, yang menjadi agenda utama dari teori politik hijau adalah memberikan penjelasan tentang krisis ekologis yang dihadapi manusia dan memberi dasar normatif dalam menghadapi krisis tersebut. Selain itu, teori politik hijau juga memfokuskan diri dalam menciptakan keadilan. ketidakadilan atau ketidaksetaraan telah menempatkan negara berkembang pada posisi yang dirugikan oleh negara maju. Hal ini karena negara maju sering mengeksploitasi sumber daya alam negara berkembang sehingga hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan di negara berkembang tersebut yang diakibatkan oleh peralatan industry negara naju.

Fokus utama politik hijau secara umum adalah adanya jaminan kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya, maka titik utama pada penggunaan lingkungan adalah adanya pembangunan yang berkelanjutan yang sifatnya jangka panjang. Pendekatan Politik Hijau menegaskan bahwa kelompok-kelompok kepentingan yang bermunculan disekitar masalah lingkungan merupakan kelompok yang sangat mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Salah

<sup>33</sup> Ibid, hal 342

.

satu sifat organisasinya sangat mandiri terhadap garis-batas antara kelompok mereka dengan kekuasaan dan independensinya terjaga.<sup>34</sup>

Politik Hijau dengan dua konsep utamanya yaitu keberlanjutan ekologis (ecological sustainability) serta desentralisasi tata kelola lingkungan, menjadi jalan alternatif bagi penyelesaian masalah lingkungan yang biasanya bertumpu pada konsep pembangunan keberlanjutan (sustainable development) dan pembentukan rezim lingkungan internasional yang terbukti belum dapat menyelesaikan problem lingkungan dunia.

Sementara itu R.E Goddin juga menempatkan etika pada pusat dari posisi politik Hijau. Ia menyatakan bahwa *Green Theory of Value* merupakan pusat dari teori hijau, dengan mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari sesuatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah, dan lebih daripada sekedar peran manusia. Lain lagi dengan John Barry, dia melihat bahwa Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain:

- 1. Sebuah teori distribusi (intergerenasional) keadilan.
- 2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi.
- 3. Usaha untuk mencapai keberlansungan ekologi. 35

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Apriawan. "Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional". Multyversa, jornal volume 1 no 02, 34-59.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>John Barry, *Green Political Theory and The State*, *Discursive Sustainability; The State* (and citixen) of Green Political Theory, diakses dari http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf pada tanggal 7 april 2017.

4. Tiga prinsip utama inilah merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konsepsi dari teori hijau.

Politik Hijau menawarkan konsep desentralisasi sebagai implementasi kontrol yang lebih baik dalam mengatasi kontrol level global dapat lebih efektif dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, yakni skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi tehadap alam sekitar dalam kehidupn mereka. Dengan konsep itu, selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politics bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan.

Gerakan lingkungan adalah istiah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk aksi kesadaran manusia yang peduli terhadap kerusakan lingkungan, serta berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang terancam akibat kerusakan lingkungan. Dua terminologi yang erat kaitannya dengan gerakan lingkungan adalah konservasi dan "gerakan hijau" (Green movement). Teori Politik Hijau (Green political theory) adalah khusus diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi teori politik.

Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalism) atau sebagai makluk sosial (seperti pandangan sosislisme) akan tetapi sebagai natural beings, dan lebih jauh sebagai political animals. Sedangkan perlu untuk membedakan antara green politics dan environmentalism. Environmentalis menerima kerangka kerja yang ada dalam

politik, sosial, ekonomi dan struktur normative dalam dunia politik dan mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang ada tersebut.

Sementara Politik Hijau menganggap bahwa struktur tersebut sebagai dasar utama bagi munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur tersebut butuh perubahan dan perhatian yang lebih utama. Dalam pembahasan lain di buku *Theories of International Relations* karya Andrew Linklater dan Scott Burchill (1996),<sup>36</sup> dijabarkan bahwa dunia sedang mengalami masalah yang sangat krusial, terlepas dari isu-isu yang selalu dibahas dalamilmu Hubungan Internasional, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan sebagainya. Masalah ini mengikis eksistensi bumi dalam aspek fisiknya secara perlahan.

31

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Mattew Patterson, 2001, "Green Politics", dalam Burchill, Schoot, and all, Journal "Theories of International Relation", volume 2